BAB II

PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF). Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Determinant Of Non Performing Loan: The Case of Islamic Banking* (Irman Firmansyah 2014) paper ini menganalisis pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia menggunakan *Gross Domestic Product* (GDP) dan Inflasi dalam sektor makro serta menggunakan *bank size*, *Financing Deposit Ratio* (FDR) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dari sisi internal bank. Memberikan hasil penelitia npertama, GDP berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah Kedua, inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bermasalah. Ketiga, likuiditas berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. Serta menemukan bahwa total aset dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS. Hal ini memberikan bukti statistik bahwa besar kecilnya total aset serta efisiensi BPRS tidak berpengaruh terhadap NPF.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Sri Wahyuni Asnaini 2014) menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS*), Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai variable yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory atau penelitian penjelasan yang menjelaskan hubungan kausal dengan maksud untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu variabel atau beberapa variabel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang terdapat di website masing-masing Bank Umum Syariah.Periode pengambilan data dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2013.Pertama. *Gross Domestic Product* (GDP) tidak memberikan pengaruh secara signifikan *terhadap Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Kedua. Inflasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan *terhadap Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Sayriah Di Indonesia. Ketiga. *Financing Deposit Ratio* (FDR) tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Keempat. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Kelima, *Capital Adecuaty Ratio* (CAR)memberikan

pengaruhsecara negatif dan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Sayriah Di Indonesia.

3. Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya *Non Performing Loan* (Stusi Kasus pada Bank Umum Konvensional yang menyediakan layanan kredit pemilikan rumah periode 2008-2011) (Anin Diyanti, Endan Tri Widyarti 2012) dalam penelitian ini menggunakan metode model regresi berganda menggunakan variable *Bank Size*, *Loan Deposite Ratio* (LDR), *Capital Adequancy Ratio* (CAR), *Gross Domestic Prosuct* (GDP), dan Laju inflasi mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF). Dalam penelitian menemukan hasil uji-F bahwa secara bersamaan variable *Bank Size*, *Loan Deposite Ratio* (LDR), *Capital Adequancy Ratio* (CAR), *Gross Domestic Prosuct* (GDP), dan Laju inflasi mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF). Namun uji-T menunjukan hanya inflasi yang menunjukan hasil positif dan signifikan, kemudian LDR berpengaruh negative dan tidak siginifikan. SEmentara bank size, CAR dan GDP berpengaruh negative namun siginifikan terhadap NPF.

Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Persamaanya dalam penelitian ini adalah variable yang digunakan,beberapa variable yang diduga akan mempengaruhi nilai NPF dari sisi ekstenal yaitusektor makroekonomi menggunakan laju inflasi dan internal menggunakan rasio-rasio pengukuran kinerja keuangan bank. Likuiditas bank yang dipresentasikan dengan rasio *Financing Deposit Ratio* (FDR), *Capital*

Adequency Ratio (CAR) rasio kekuatan modal, serta kekuatan aktiva bank yang diukur dengan *Bank Size* (Total Aset). Perbedaannya yaitu dengan data pembaruan selama 5 tahun terakhir dan penelitian difokuskan pada tujuh BPRS di daerah Jawa Barat karena memiliki angka penyaluran pembiayaan terbesar dan memiliki jumlah asset serta dana pihak ketiga yang tertinggi di Indonesia. Sehingga bisa dianalisis pengaruh Inflasi, FDR, CAR, dan *Bank Size* terhadap NPF pada BPRS di Jawa Barat agar bisa meminimalisir potensi pembiayaan bermasalah dan dapat menilai kondisi sebuah bank yang baik yang tercermin dari potensi risiko kreditnya.

B. Landasan Teori

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 03/03.POJK/2016 BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiataannya tidak memberikan jasa lalu-lintas pembayaran. BPRS didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan bank konvensonal dalam penetapan tingkat suku

bunga (*rate of interest*), yang selanjutnya BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.[12]

Adapun tujuan yang di kehendaki dengan berdirinya BPRS adalah[13]:

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama mas[14]yarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
b. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
c. Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya emberikan pelayanan jasa dalam mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.[15] Kegiatan BPRS antara lain adalah:

a. Penghimpunan dana masyarakat

BPRS menghimpun dana masyarakat degan enawarkan produksi tabungan dan deposito dan produk penghimpunan dana lainnya yang diperbolehan sesuai perturan Bank Indonesia.

---

[12]Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid. Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim. 2008, hal.38.
[13] Heri Sudarsono. Bank Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia, 2003,hal. 95.
[14]

[14] Ismail. Manajemen Perbankan: Dari Teori menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana.2010, hal. 16.

b. Penyaluran dana kepada masyarakat

BPRS menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan penempatan pada bank lain dari aktivitasnya ini BPR memperoleh pendapatan.

c. Tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

BPRS dilarang menawarkan giro karena BPRS tidak boleh melakukan transaksi lalu lintas pembayaran.

2. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukn sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[16]Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman modal.

Menurut sifat penggunaanya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu[17]:

[16] Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 17.
[17] Syafii Antonio. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011, hal. 160

a. Pembiaayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, misalnya untuk peningkatan usaha, baik usaha prduksi, perdagangan maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan memenuhi kebutuhan knsumsi yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pendanaan yang biasanya digunakan dalam pembiayaan konsumtif yaitu Al bai' bi tsaman ajil, Al ijarah al-muntahia bit-tamlik, Al-musyarakah mtanaqishah dan Ar-Rahn.

Dana yang dihimpun oleh bank tersebut harus disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hal ini dilakukan karena fungsi bank adalah perantara antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dan keuntungan bank diperoleh dari harga jual dana tersebut setelah dikurangi oleh biaya operasional.Dengan demikian bank harus mampu menempatkan dana tersebut dengan baik agar memberikan profit untuk bank.

3. Tujuan Pembiayaan

Dengan keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah maupun swasta, maka perbankan nasional memegang fungsi yang sangat penting untuk menyediakan sumber daya modal dalam pembangunan ekonomi negara dengan mendanai sektor produtif.

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu sebagai berikut[18]:

a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dai bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang kelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembangkan pembiyaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan

[18]Veitzhal Rivai dan Arifin Arviyan. Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hal. 711.

demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar presentasi yan diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dan menjadi kenyataan.

Maka dari itu pembiayaan yang diberikan kepada suatu pihak digunakan untuk pendanaan yang sudah direncanakan.

4. Analisis Pembiayaan

Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahuulu memberikan resiko yang sangat tinggi bagi bank.Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak diberikan. Akibatnya, jika salah dalam menganalisis pembiayaan yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama pembiayaan

macet, walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis.[19]

Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, dengan tujuan menilai kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung. Dengan demikian pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaanya yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan.[20]

Cara yang dipergunakan oleh suatu bank dalam mengurangi resiko pembiayaan tersebut adalah dengan melakukan analisis secara rinci terhadap calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan..Analisis tersebut mencangkup 5C yaitu *Character, Capital, Capacity, Condition of Economy* dan *Collateral.*

a. *Character* artintya sifat atau karakter nasabah yang akan diberikan pembiayaan.
b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang diberikan.

[19]Kasmir.*Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press, 2008, hal. 83.
[20]Ibid, hal.59.

c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan nasabah yang akan menerima pembiayaan.

d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki oleh nasabah dan diberikan kepada bank.

e. *Conditionof Economy*artinya keadaan usaha atau nasabah memiliki prospek kedepan atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambartan yang mungkin mengganggu proses usaha. Berdasarkan analisis pembiayaan yang ada diharapkan perbankan mampu mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana.

Dalam setiap akad pembiayaan yang dilakukan oleh bank, bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA).PPA adalah cadangan yang harus dibentuk bank sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aktiva masing-masing.Tujuannya adalah untuk pelindung saat pembiayaan pembiayaan tersebut bermasalah.[21]

5. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan kondisi yang sangat ditakuti oleh setiap bank. Karena dengan adanya pembiayaan bermasalah akan menyebabkan pendapatan bank berkurang, kemudian memungkinkan

[21]Haryono. Dasar-Dasar Akuntansi, Yogyakarta: 2009: 161

terjadinya penurunan laba. Kondisi kinerja usaha bank yang kurang bagus akan berpengaruh secara menyeluruh terhadap upaya perbaikan kesejahteraan pegai, pemupukan modal sendiri, pengemangan usaha dan sebagainya.

Penilaian kualitas aktiva dilihat dari tingkat kelancaran nasabah dalam mengembalikan dananya kepada bank, tingkat kelancaran ini dikategorikan menjadi 5 macam yaitu lancar, kurang lancar, lancar diragukan, perhatian kusus dan macet. Kualitas aktiva ini selain berpengaruh terhadap kesehatan bank juga berpengaruh pada perolehan laba bank.[22]

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai target yang diinginkan, dengan kata lain yaitu pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.[23]Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan

[22]Ibid, hal. 312.
[23]Ibid, hal. 477.

pinjaman atau melakukan investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan dana, sehingga penilaian pembiayaan kurang teliti.

Adapun pembagian-pembagian kualitas pembiayaan adalah sebagai berikut[24]:

a. Pembiayaan Lancar
    1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu.
    2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
    3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
b. Perhatian Khusus
    1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
    2) Kadang – kadang terjadi cerukan.
    3) Mutasi rekening relatif aktif.
    4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
    5) Didukung oleh pinjaman baru.
c. Kurang Lancar
    1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
    2) Sering terjadi cerukan.

[24]Ibid, hal. 704.

3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi mudharib.
6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
4) Terjadi kapitalisasi bunga.
5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

NPF merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan ysng diberikanoleh bank. Rasio ini

mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio NPF maka menunjukkan semakin tidak baik kualitas pembiayaan yang disalurkan.[25] Berikut adalah kriteria penilaian NPF:

Tabel 2.1 Kriteria Penilain NPF oleh BPRS

Peringkat Kriteria	Keterangan
Peringkat 1 NPF < 2%	Sangat Baik
Peringkat 2 2% ≤ NPF < 5%	Baik
Peringkat 3 5% ≤ NPF < 8%	Cukup Baik
Peringkat 4 8% ≤ NPF< 12%	Kurang Baik
Peringkat 5 NPF ≥ 12%	Tidak Baik

6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Proses realisasi pembiayaan di BPRStidak mudah karena tidak semua nasabah memiliki *passion* bisnis yang sama satu sama lain. Dalam kenyataanya ada nasabah yang bagusdalam mengelola namun ada juga nasabah yang gagal dalam menjalankan usaha.Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang ketat dari bank sendiri untuk merealisasikan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank. Langkah pengamanan yang dilakukan

[25]Taswan. Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010, hal. 166.

bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Sebelum realisasi pembiayaan

   Dalam tahapan ini berdasarkan perseujuan nasabah bank melakukan penutupan asuransi dan atau pengikatan agunan jika diperlukan.Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan.

2. Seteah realisasi pembiayaan

   Bagi bank, pencairann pembiayaan barulah akhir dari permohonan yang selanjutnya merupakan awalpemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan. Dalam tahap awal pemeliharaan sebagaimana diajukan dalam permohonan/persetujuan bank, dan jangan sampai keluar kesepakatan.Selanjutnya, bank melakukan pembinaan dan control atas aktivitas bisnis.

Kebanyakan bank syariah lebih memberlakukan upaya *rescheduleing*, *reconditining*, dan pembiayaan ulang dalam bentuk Qordhul Hasan dan jaminan harus tetap ada sebagai persyaratn jaminannya.

7. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam kaitannya dengan pembiayaan bermasalah tidak mudah dalam mencari jalan keluarnya, berikut adalah klasisikasi penyebab pembiayaan bermasalah menurut Taswan:

Tabel 2.1 Klasifikasi Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Klasifikasi	Penyebab
Eksternal	Lingkungan usaha debitur
	Musibah
	Persaingan antar bank yang tidak sehat
Internal	Kebijakan perkreditan yang kurang menunjang
	Kelemahan system dan prosedur kurang menunjang
	Pemberian dan pengawasan kredit yag menyimpang dari prosedur
	Itikad yang kurang baik dari pihak bank

Salah satu cirisifatpembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening, laporan keuangan, kegiatan bisnis, nasabah dan faktor makroekonomi.Selain itu faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah itu sendiri disebabkan oleh tiga unsur, yaitu dari pihak bank nasabah, serta diluar bank dan nasabah tersebut.Dengan demikian, dapat dilihat bahwa banyak aspek yang dapat mempengaruhi tingkat kredit atau pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan.

Faktor-faktor internal yang meynebabkan pembiayaan bank bisa juga dalam bentuk kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, biaya-biaya dan pendapatan, atau dalam arti lain bahwa jumlah asset, perputaran asset, jumlah hutang dan piutang, jumlah modal, tingkat penyaluran pembiayaan, laba operasi, likuiditas bank dan lainnya akan menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan sebuah bank. Kinerja keuangan perbankan dapat dicerminkan dari laporan keuangan yang diterbitkan setiap periode tertentu. Laporan keuangan terdiri dari: neraca, perhitungan laba/rugi, laporan laba ditahan, laporan arus kas, dll..

Dengan menganalisa laporan keuangan tersebut, maka akan diketahui apa dan bagaimana kondisi keuangan perbanka..Hasil dari informasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan.Laporan keuangan ini menggambarkan kejadian yang sebenarnya, terukur secara riil dan dapat dipertanggungjawabkan oleh bank.Maka dari itu faktor yang diduga mempengaruhi pembiayaan bermasalah dapat diukur dengan rasio kinerja keuangan bank yang terlampir di laporan keuangan bank.*Financing Deposit Ratio* (FDR) sebagai tolak ukur kekuatan likuiditas, *Capital Adequancy Ratio* (CAR) untuk mengukur kekuatan modal yang dimiliki bank serta *bank size* untuk mengukur kekuatan asset yang dimiliki oleh bank.

Kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam penyaluran, antara lain sebagai yaitu adanya perubahan kondisi

ekonomi dan regulasi yang mempengaruhi bidang usaha yang dilakukan nasabah. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu keadaan makroekonomi. Kemudian tingkat persaingan yang tinggi yang akan menyebabkan usaha yang dilakukan nasabah sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya. Berikut adalah beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah yang akan dibhas pada penelitian ini, berikut penjabarannya.

a. *Financing Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Rasio (FDR) merupakan rasio perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.[26]. Artinya dalam mengakui pendapatan, bank syariah menimbang rasio antara dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan yang disalurkan, serta pendapatan yang diperoleh dari penggabungan dua rasio itu.

FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun, yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito) dan tabungan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$FDR = \frac{Pembiayaan\ yang\ diberikan}{Dana\ PihakKetiga}$$

[26]Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 55.

Keberhasilan bank dalam menjalankan fungsinya sebagai peantara keuangan dapat dilihat dari nilai presentase *Financing Deposite Ratio* (FDR), dalam istilah lain *financing* adalah total pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh bank baik dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah*, piutang maupun *ijarah* dan dana pihak ketiga yang dimaksud adalah jumlahdari dana masyarakat yang dihimpun baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito.

Berikut ini adalah tingkat likuiditas yang baikuntuk perbankan sesuai dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2007 tentang Tintang Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:

Tabel 2.1 Kriteria Penilain FDR oleh BPRS

Peringkat Kriteria	Keterangan
75% < FDR < 100%	Baik
FDR < 75%	Kelebihan
FDR > 100%	Kekurangan

Bank dikatakan likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut. Artinya, semakin banyak dana yang dikeluarkan melalui penyaluran pembiayaan, maka semakin tinggi FDR, dan kemungkinan resiko pembiayaan bermasalah terjadi semakin tinggi pula sehingga NPF akan naik.

Proses analisis pengajuan pembiayaan sangat berperan penting dalam kelancaran usaha karena jika tidak, bank tidak bisa mendapatkan hasil, sebaliknya bank dapat mengalami kerugian. Faktor yang menjadi sumber pendapatan adalah pembiayaan, semakin banyak dana yang bisa disalurkan untuk pembiayaan maka dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan tidak banyak yang mengendap di bank Hal ini tercermin dari tingkat FDR. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk penyaluran pembiyaan semakin kecil jumlahnya demikian pula sebaliknya.

b. *Bank Size* (Total Asset)

Besar kecilnya size suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuannya dalam menanggung resiko yang mungkin timbul akibat berbagai situasi yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan operasinya.[27] Rasio *bank size*diperoleh dari total asset yang dimiliki bank yang bersangkutan yang terlihat pada laporan keuangan bank yang bersangkutan.

Pengelompokkan aktiva dilihat dari sifatnya terbagi menjadi dua[28], yaitu:

[27]Ismail.Manajemen Perbankan: Dari Teori menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana.2010, hal. 25.
[28] Herman Darmawi. Manajemen Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2011,hal.

1. Aktiva Tidak Produktif Meliputi: alat-alat likuid dan giro bank pada bank-bank lain dan aktif tetap dan inventaris. Disebut aktiva tidak produktif karena aktiva ini tidak menghasilkan laba atau rugi.
2. Aktiva Produktif Meliputi: pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan jangka panjang, deposito pada bank lain, call money, surat-surat berharga, penempatan dana pada bank lain di dalam dan diluar negeri dan penyertaan modal.

Bank Size dijadikan indikator pengaruh dari peningkatan NPF karena total asset dapat menunjukan kekuatan aset yang dimiliki oleh bank. Bank dengan aset yang besar memliki kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar apabila diikuti dengan hasil dari kegiatannya dalam mengembalikan asset yang digunakan untuk kegiatan produktif.

c. *Capital Adequancy Ratio* (CAR)

Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal bank syariah adalah dengan menggunakan rasio CAR Penetapan CAR bertujuan agar mempunyai modal yang cukup untuk mengatasi kemungkinan resiko yang akan muncul. Sehingga bank harus menyediakan modal minimum yang cukup. Bank perlu mempertahankan nilai CAR sesuai dengan ketentuan agar dapat melakukan ekspansi usaha dengan lebih aman dalam meningkatkan

profitabilitasnya. Bank yang sehat minimum harus memiliki CAR sebesar 8%.[29] Perhitungan rasio ini adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{Modal}{ATMR}$$

Dalam pengertian lain CAR merupakan perbandingan modal bank denga aktiva tertimbang menurut resiko. Semakin tinggi CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat permodalnnya.[30] CAR merupakan rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan, digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dalam menanggung risiko setiap pembiayaan atau aktiva produktif yang berisiko dan berkontribusi cukup besar terhadap profitabilitas. Semakin besar CAR maka keuntungan bank juga akan semakin besar.[31]

CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aset bank yang mengandung risiko seperti pembiayaan, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain yang ikut dibiayai oleh dana modal bank itu sendiri disamping memperoleh dana dari sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman, dan lain-lain.[32] Dari pengertian tersebut berarti bahwa modal pada bank digunakan

[29] Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005,hal. 142.
[30]Taswan.*Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi*. Edisi 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010,hal. 166.
[31]Kuncoro dan Suhardjono.*Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi).*Yogyakarta: BPFE, 2002, hal.573.
[32]Ibid, hal. 121.

untuk membiayai aktiva yang mengandung risiko. Semakin tinggi modal yang dimiliki bank maka akan semakin mudah bagi bank untuk membiayai dan menutupi aktiva yang mengandung risiko. Begitu juga sebaliknya jika pembiayaan yang tinggi tidak disertai dengan modal yang mencukupi maka akan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi CAR maka akan semakin rendah risiko pembiayaan yang dihadapi bank. Karena apabila pembiayaan yang disalurkan bermasalah dan modal dari bank tidak cukup untuk menutupi kegagalan pembiayaan maka tingkat risiko pembiayaan pun akan meningkat.

Modal bank dapat digolongkan atas dua golongan besar, yaitu modal inti dan modal pelengkap.[33]Modal inti adalah modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank.Modal pelengkap terdiri dari cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya depersamakan dengan modal dalam hal tertentu, dan dalam keadaan lain dapat dipersamakan dengan utang.[34]

d. Inflasi

Menurut Kamus Bank Indonesia, inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat

[33] Ibid,hal.84.
[34]Ibid, hal.85.

sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu perubahan tingkat harga secara umum[35]. Persamaanya adalah sebagai berikut:

$$Rate\ of\ Inflation = \frac{tingkat\ harga_t _ tingkat\ harga_{t-1}}{tingkat\ harga_{t-1}}$$

Menurut Paul. A. Samuelson, seperti sebuah penyait, inflasi dapat digolongkan menurut tingkat keparahannya yaitu sebagai berikut:

1) *Moderate Inflation:* karakterisitiknya adalah kenakan tingkat harga yang lambat. Pada tingkat inflasi ini orang-orang masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaan dalam bentuk uang daripada dalam bentuk asset riil.
2) *Galloping Inflation:* inflasi pada tingkatan 20% sampai 200% per tahun.pada tingkatan ini orng hanya memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk asset-aset riil.

[35] Adiwarman, A. Karim. Ekonomi Makro Islami. Jakarta: Raja Grafindo.2007, hal. 136.

3) *Hyper Inflation*: Inflasi jenis ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi dan tidak akan pernah ada pemerintahan yang dapat bertahan menangani hyper inflation.

Menurut para ekonom islam inflasi berakibat sangkat buruk bagi perekonomian[36]:

1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran dimuka dan fungsi dari unit perhitungan.
2) Melemahkan menabung dan sikap enabng dri masyarakat.
3) Meningkatkan kecenderungan berbelanja barang-barang non primer dan barang-barang mewah.
4) Mengarahkan investasi pada hal-hal non-produktif yaitu penumpukkan kekayaan dengan mengorbankan investasi kea rah produktif.

Pembayaran angsuran semakin tidak tepat yang diakibatkan oleh menurunnya penghasilan perusahaan karena daya beli masyarakat bekurang akan membuuat kualitas pembiayaan semakin buruk bahkan terjadi pembiayaan bermasalah, sehingga meningkatkan angka NPF.

[36] Ibid,hal.139.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah yang akan diuji kebenarannya berdasarkan uraian perumusan masalah, teori, serta pada tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

a. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Rasio FDR adalah salah satu variable yang diduga mempengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank, maka semakin tinggi rasio FDR memungkinkandana yang akan disalurkan menjadi semakin meningkat. dan laba yang diperoleh bank akan tinggi. Di sisi lain, semakin banyak jumlah pembiayaan diberikan akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi terhadap penyaluran pembiayaan.

H1: *Financing Deposite Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

b. *Bank Size* (Total Aset) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Bank dengan aset yang besar memliki kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar apabila diikuti dengan hasil dari aktivitas aset tersebut. Salah satu faktor yang diprediksi mempengaruhi

pembiayaan bermasalah adalah *bank size*. Pada perbankan*bank size* lebih cenderung dilihat dari total asetnya mengingat produk utamanya adalah pembiayaan serta investasi.

H2: *Bank Size* (Total Aset) berpengaruh negative terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

c. *Capital Adequency Ratio* (CAR) berpengaruh negative terhadap *Non Performing Financing*(NPF)

Semakin tinggi presentase CAR maka semakin besar pula kemampuan bank untuk menekan terjadinya pembiayaan bermasalah. CAR berfungsi untuk menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank dapat mengurangi pembiayaan bermasalah.

H3: Capital Adequency Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing*(NPF)

d. Inflasi Berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Inflasi yang dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang secara terus-menerus sehingga mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Daya beli ini akan mempengaruhi penjualan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan dan meyebabkan berkurangnya return perusahaan sehingga nasabah akan kesulitan membayar angsuran kepada bank.

H4: Inflasi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF)